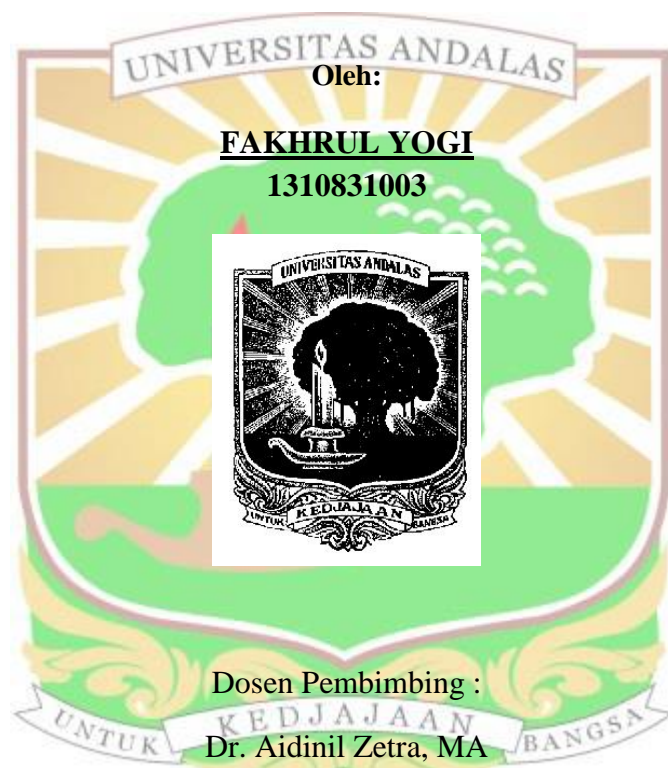


**PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI BIDANG KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012-2016**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Politik di Jurusan Ilmu  
Politik Universitas Andalas*



Drs. Tamrin, M.Si

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

## ABSTRAK

**Fakhrul Yogi, No. BP. 13 10831003, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Pembimbing I Aidinil Zetra. Pembimbing II Tamrin. Judul Skripsi : Pelaksanaan Desentralisasi di bidang Kepariwisata Kabupaten Tanah Datar.**

Keluarnya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di ganti dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah memberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat di Daerah yang bekerja di lapangan yang tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan Desentralisasi maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah. Maka dalam penelitian ini melihat bagaimana Pelaksanaan Desentralisasi di bidang kepariwisataan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pembangunan dan pengembangan Obyek Pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai instrumen utama di samping dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Analisis data menggunakan metode etik dan emik serta literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Desentralisasi di bidang Kepariwisata di Kabupaten Tanah Datar menemukan kendala-kendala dalam proses pengembangan yaitu ada enam kendala yang mendasar yakni (1) Perencanaan Kebijakan Kepariwisata di Tanah Datar belum jelas diantaranya terletak pada rencana induk pembangunan pariwisata belum ada namun rencana induk tersebut sedang dalam proses pembahasan DPRD pada tahun ini. (2) Luas nya kabupaten Tanah Datar menyebabkan sulitnya pemerintah daerah untuk membagi anggaran (3) Pembebasan Lahan (Adat) Masyarakat yang mana kepemilikan tanah tidak berada pada satu tangan (4) Kurangnya Political Will terkait dengan visi dan misi kepala daerah (5) Tidak adanya keterlibatan Sektor Swasta dalam Proses Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tanah Datar (6) Sumber Daya Manusia (SDM) / Pemahaman masyarakat yang rendah.

**Kata kunci : Desentralisasi, Kepariwisataan.**

## ABSTRACT

**Fakhrul Yogi, No. BP. 13 10831003, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences Andalas University of Padang. Aidinil Zetra. Advisor II Tamrin. Thesis Title: Implementation of Decentralization in the Tourism Area of Tanah Datar Regency.**

The issuance of Law No.22 of 1999 on Regional Government replaced by Law no. 23 of 2014 on Regional Government, has provided widespread opportunities for regions to take care of their own households in accordance with the aspirations and interests of local communities. Decentralization can be the way to overcome the limitations of central planning by delegating a number of authorities, especially in development planning, to officials in the working Areas who are well aware of the problems facing the community. With Decentralization then planning can be done in accordance with the interests of the people in the region. So in this research see how Implementation of Decentralization in the field of tourism and obstacles faced by Local Government of Tanah Datar Regency in development and development of Tourism Object. This research uses qualitative approach and descriptive research type. Data collection uses in-depth interview techniques as the main instrument in documentation and observation . Selection of informants was done by purposive sampling. Data analysis using ethical and emic methods and literature related to the topic of the problem. The results of this study indicate that the implementation of Decentralization in the field of Tourism in Tanah Datar found obstacles in the development process that is there are six basic constraints such as Unclear Policy Planning Tourism development problems of tourism development of flat land lies in the master plan of tourism development has not yet but the master plan is in the process of discussing the DPRD this year. Tourism Budget The area of Tanah Datar district has made it difficult for local governments to divide the budget. Land Acquisition (Adat) Land tenure communities are not in one hand. The lack of Political Will related to the vision and mission of the former head of the region does not include the tourism sector in it. Absence of Private Sector involvement in Tourism Development Process of Tanah Datar Regency. Human Resources (HR)

**Keyword : Decentralization, tourism.**